



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2024-2026**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung 2024-2026 serta menjadi acuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di sektor perikanan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung, pelaku usaha dan seluruh stakeholders yang berkepentingan.

Tulungagung, 28 Juni 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

 **LUGU TRI HANDOKO, SE. MM.**

Pembina Tk. I

NIP. 19660724 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum... ..	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	6
2.2 Sumberdaya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	12
2.2.1 Sumber daya Manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	12
2.2.2 Sumber Daya Aset Tetap	13
2.3 Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	17
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.....	19
2.3.2 Capaian Kinerja Keuangan 2019-2023	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan	23
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	26
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 33	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan 2024-2026.....	33
BAB VIII PENUTUP	46

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Perikanan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara efisien, efektif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya semua pihak merasa optimis bahwa sector perikanan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi sector unggulan mengingat sumberdaya perikanan di Kabupaten Tulungagung sangat berpotensi yang pengelolaan optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan demikian sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 selanjutnya RPD ini menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sehingga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah, Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2024 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2005 – 2025;
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;
 13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

2.3. Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

3.3. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan.

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten

Dinas Perikanan sebagai pelaksana pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Tulungagung memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Dalam peraturan ini Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Adapun fungsi yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1.Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional:
- d. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional:

- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas pokok diantaranya: memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang Perikanan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang perikanan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. Pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan;
- e. Pelaksanaan administrasi;
- f. Pembinaan profesional tenaga perikanan;
- g. Pembinaan UPTD dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan; rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perikanan;

- d. Pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pengelolaan perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan produksi budidaya ikan;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya ikan;
- d. Pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- e. Pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya di kawasan budidaya;
- f. Pelaksanaan pendataan statistik di bidang perikanan budidaya;
- g. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.

C. BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pengelolaan perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan produksi perikanan tangkap;
- c. Pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- d. Pelaksanaan pendataan statistik di bidang perikanan tangkap;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan nelayan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Sumberdaya Ikan baik di Perairan Umum Daratan dan atau perairan pantai;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap.

D. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan mutu dan peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pelaksanaan Pemberdayaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan;
- d. Pengoordinasian penyediaan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan pendataan statistik di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

E. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

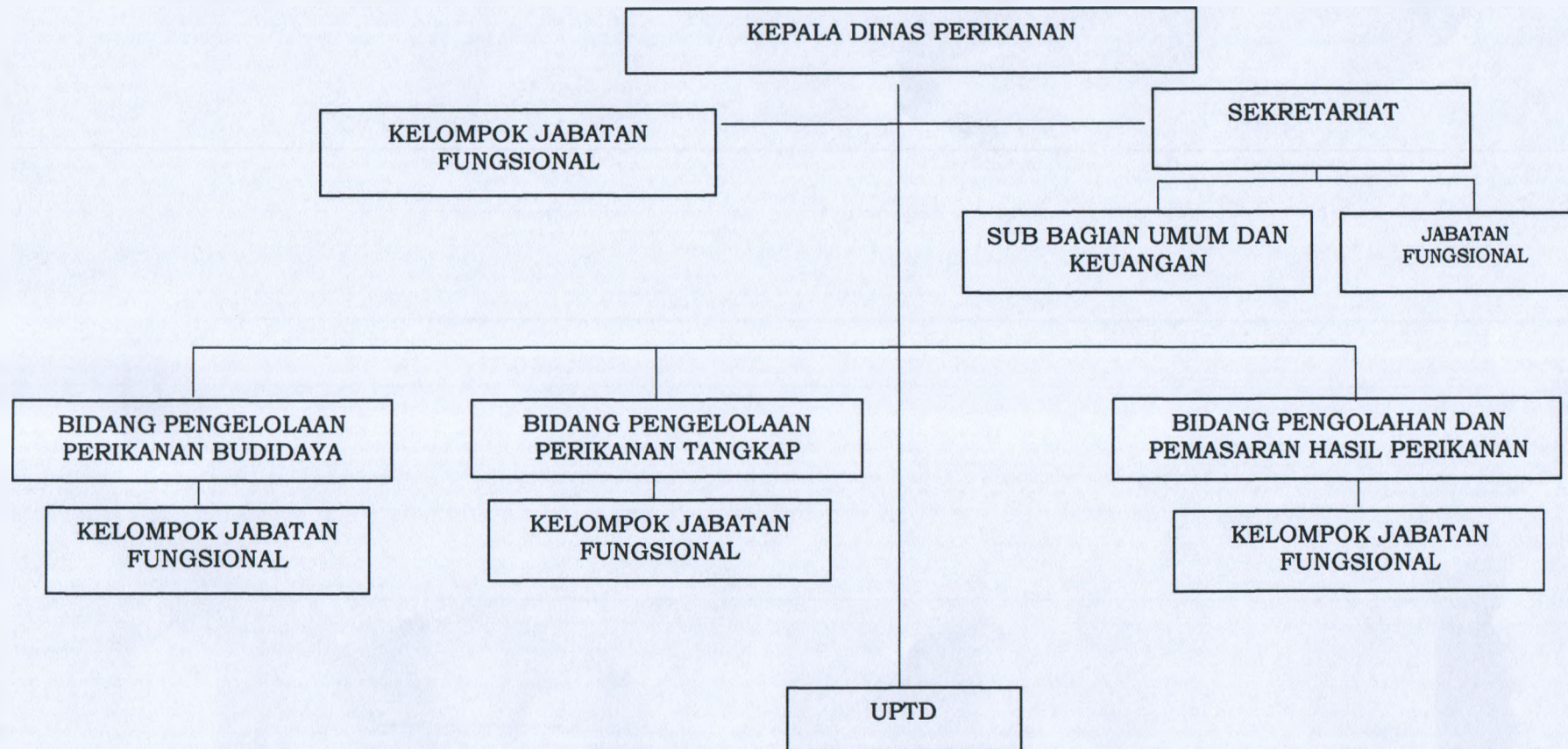
- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.



2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Dalam rangka peningkatan kinerja dan pelaksanaan pembangunan perikanan perlu dukungan ketersediaan SDM yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. SDM yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sampai dengan per 31 Desember 2022 sebanyak 32 ASN. Berdasarkan pangkat dan golongan, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung didominasi ASN berpangkat penata/golongan III yang secara relatif sebanyak 59,38% dari keseluruhan ASN. Klasifikasi ASN berdasarkan pangkat dan golongan disajikan dalam tabel 1. berikut:

Tabel 1. Klasifikasi ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah ASN Laki-laki (orang)	Jumlah ASN Perempuan (orang)
Pembina	IV	3	2
Penata	III	9	10
Pengatur	II	5	3
Jumlah		17	15

ASN pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung juga bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah. Berdasarkan kriteria ini, lulusan sarjana (S1) mendominasi dengan jumlah relatif 59,38% dari keseluruhan ASN. Klasifikasi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel 2. Berikut:

Tabel 2. Klasifikasi ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN (orang)
Magister (S 2)	3
Sarjana (S 1)	19
Diploma	5
SLTA	4
SLTP	1
SD	-
Jumlah	32

2.2.2. Sumber Daya Aset Tetap

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung juga ditunjang dengan prasarana berupa aset tetap sebagaimana tabel 3. berikut:

Tabel 3. Sumber Daya Asset Tetap Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	01.		TANAH	5	2.338.750.000,00	
	01.	1.3.1.	TANAH	5	2.338.750.000,00	
	01.	1.3.1.01.	TANAH	5	2.338.750.000,00	
	01.	1.3.1.01.01.	TANAH PERSIL	5	2.338.750.000,00	
	01.	1.3.1.01.01.04.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	5	2.338.750.000,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	712	7.363.886.549,52	
	02.	1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN	712	7.363.886.549,52	
	02.	1.3.2.01.	ALAT BESAR	33	900.513.124,52	
	02.	1.3.2.01.01.	ALAT BESAR DARAT	24	647.193.624,52	
	02.	1.3.2.01.01.07.	COMPACTING EQUIPMENT	4	168.510.000,00	
	02.	1.3.2.01.01.11.	MESIN PROSES	20	478.683.624,52	
	02.	1.3.2.01.02.	ALAT BESAR APUNG	1	188.500.000,00	
	02.	1.3.2.01.02.04.	KAPAL TARIK	1	188.500.000,00	
	02.	1.3.2.01.03.	ALAT BANTU	8	64.819.500,00	
	02.	1.3.2.01.03.04.	ELECTRIC GENERATING SET	5	42.989.500,00	
	02.	1.3.2.01.03.05.	POMPA	1	3.860.000,00	
	02.	1.3.2.01.03.07.	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	2	17.970.000,00	
	02.	1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	75	2.114.693.000,00	
	02.	1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	48	2.042.542.000,00	
	02.	1.3.2.02.01.01.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2	550.755.000,00	
	02.	1.3.2.02.01.02.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	2	638.860.000,00	
	02.	1.3.2.02.01.03.	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1	168.510.000,00	
	02.	1.3.2.02.01.04.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	42	665.240.000,00	
	02.	1.3.2.02.01.05.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	1	19.177.000,00	
	02.	1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	27	72.151.000,00	
	02.	1.3.2.02.02.01.	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	25	66.596.000,00	
	02.	1.3.2.02.02.04.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	2	5.555.000,00	
	02.	1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	30	138.122.600,00	
	02.	1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	4	11.250.000,00	

02.	1.3.2.03.01.01.	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	1	3.750.000,00
02.	1.3.2.03.01.09.	PERKAKAS PABRIK ES	3	7.500.000,00
02.	1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	29.400.000,00
02.	1.3.2.03.02.11.	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	4	29.400.000,00
02.	1.3.2.03.03.	ALAT UKUR	22	97.472.600,00
02.	1.3.2.03.03.01.	ALAT UKUR UNIVERSAL	6	17.076.600,00
02.	1.3.2.03.03.10.	ALAT TIMBANGAN/BIARA	15	74.896.000,00
02.	1.3.2.03.03.11.	ANAK TIMBANGAN/BIARA	1	5.500.000,00
02.	1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	119	1.127.185.411,00
02.	1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN	119	1.127.185.411,00
02.	1.3.2.04.01.01.	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	1	16.000.000,00
02.	1.3.2.04.01.02.	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	13	54.585.000,00
02.	1.3.2.04.01.03.	ALAT PANEN	2	10.000.000,00
02.	1.3.2.04.01.04.	Palat Penyimpan Hasil Percobaan Ertanian	10	474.590.000,00
02.	1.3.2.04.01.05.	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	12	298.846.600,00
02.	1.3.2.04.01.06.	ALAT PROSESING	3	21.000.000,00
02.	1.3.2.04.01.08.	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	78	252.163.811,00
02.	1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	267	1.595.425.274,00
02.	1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	70	338.788.250,00
02.	1.3.2.05.01.01.	MESIN KETIK	1	2.500.000,00
02.	1.3.2.05.01.02.	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1	12.960.000,00
02.	1.3.2.05.01.04.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	45	190.655.450,00
02.	1.3.2.05.01.05.	ALAT KANTOR LAINNYA	23	132.672.800,00
02.	1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	185	1.207.336.024,00
02.	1.3.2.05.02.01.	MEUBELAIR	86	369.117.000,00
02.	1.3.2.05.02.03.	ALAT PEMBERSIH	2	7.000.000,00
02.	1.3.2.05.02.04.	ALAT PENDINGIN	32	249.463.200,00
02.	1.3.2.05.02.05.	ALAT DAPUR	4	7.940.000,00
02.	1.3.2.05.02.06.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	55	564.875.200,00
02.	1.3.2.05.02.07.	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	6	8.940.624,00
02.	1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	12	49.301.000,00
02.	1.3.2.05.03.01.	MEJA KERJA PEJABAT	4	16.059.000,00
02.	1.3.2.05.03.02.	MEJA RAPAT PEJABAT	2	12.650.000,00
02.	1.3.2.05.03.03.	KURSI KERJA PEJABAT	5	19.092.000,00
02.	1.3.2.05.03.07.	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	1	1.500.000,00
02.	1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	54	242.575.000,00
02.	1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO	33	158.470.000,00
02.	1.3.2.06.01.01.	PERALATAN STUDIO AUDIO	4	49.230.000,00
02.	1.3.2.06.01.02.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	29	109.240.000,00
02.	1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI	21	84.105.000,00
02.	1.3.2.06.02.01.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	20	52.205.000,00
02.	1.3.2.06.02.02.	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	1	31.900.000,00
02.	1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	33	256.002.100,00
02.	1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM	33	256.002.100,00
02.	1.3.2.08.01.01.	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	9	64.142.100,00
02.	1.3.2.08.01.03.	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	7	53.910.000,00
02.	1.3.2.08.01.14.	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	15	29.250.000,00
02.	1.3.2.08.01.46.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	2	108.700.000,00
02.	1.3.2.10.	KOMPUTER	101	989.370.040,00
02.	1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT	61	772.017.340,00
02.	1.3.2.10.01.02.	PERSONAL KOMPUTER	61	772.017.340,00

	02.	1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER	40	217.352.700,00
	02.	1.3.2.10.02.02.	PERALATAN MINI KOMPUTER	20	70.500.000,00
	02.	1.3.2.10.02.03.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	18	109.102.700,00
	02.	1.3.2.10.02.04.	PERALATAN JARINGAN	2	37.750.000,00
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	65	13.075.148.118,58
	03.	1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	65	13.075.148.118,58
	03.	1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	65	13.075.148.118,58
	03.	1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	63	12.718.651.118,58
	03.	1.3.3.01.01.01.	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	23	5.039.639.157,10
	03.	1.3.3.01.01.02.	BANGUNAN GUDANG	1	92.584.400,00
	03.	1.3.3.01.01.03.	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	1	44.234.000,00
	03.	1.3.3.01.01.04.	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	3	896.540.000,00
	03.	1.3.3.01.01.08.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1	190.382.000,00
	03.	1.3.3.01.01.09.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	3	582.107.000,00
	03.	1.3.3.01.01.11.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	1	81.413.667,00
	03.	1.3.3.01.01.12.	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASIPASAR	3	749.571.300,00
	03.	1.3.3.01.01.13.	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	4	472.875.490,00
	03.	1.3.3.01.01.29.	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	8	915.582.581,00
	03.	1.3.3.01.01.30.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	15	3.653.721.523,48
	03.	1.3.3.01.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	356.497.000,00
	03.	1.3.3.01.02.04.	MESS/MSMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	2	356.497.000,00
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	63	7.916.445.767,82
	04.	1.3.4.	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	63	7.916.445.767,82
	04.	1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN	14	2.540.133.244,20
	04.	1.3.4.01.01.	JALAN	14	2.540.133.244,20
	04.	1.3.4.01.01.09.	JALAN KHUSUS	14	2.540.133.244,20
	04.	1.3.4.02.	BANGUNAN AIR	20	2.730.442.778,85
	04.	1.3.4.02.01.	BANGUNAN AIR IRIGASI	11	1.613.741.000,00
	04.	1.3.4.02.01.03.	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	8	1.058.881.000,00
	04.	1.3.4.02.01.04.	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	2	552.860.000,00
	04.	1.3.4.02.01.05.	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	1	2.000.000,00
	04.	1.3.4.02.02.	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	9	1.116.701.778,85
	04.	1.3.4.02.02.01.	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	9	1.116.701.778,85
	04.	1.3.4.03.	INSTALASI	8	681.089.599,77
	04.	1.3.4.03.01.	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1	10.781.583,77
	04.	1.3.4.03.01.02.	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	1	10.781.583,77
	04.	1.3.4.03.05.	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	185.500.000,00
	04.	1.3.4.03.05.09.	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	1	185.500.000,00
	04.	1.3.4.03.06.	INSTALASI GARDU LISTRIK	5	431.942.338,00
	04.	1.3.4.03.06.01.	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	3	78.103.188,00
	04.	1.3.4.03.06.02.	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	2	353.839.150,00
	04.	1.3.4.03.08.	INSTALASI GAS	1	52.865.678,00
	04.	1.3.4.03.08.04.	INSTALASI GAS LAINNYA	1	52.865.678,00
	04.	1.3.4.04.	JARINGAN	21	1.964.780.145,00
	04.	1.3.4.04.01.	JARINGAN AIR MINUM	14	1.599.100.574,00
	04.	1.3.4.04.01.01.	JARINGAN PEMBAWA	14	1.599.100.574,00
	04.	1.3.4.04.02.	JARINGAN LISTRIK	5	362.679.571,00
	04.	1.3.4.04.02.01.	JARINGAN TRANSMISI	4	345.435.271,00
	04.	1.3.4.04.02.03.	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	1	17.244.300,00
	04.	1.3.4.04.03.	JARINGAN TELEPON	2	3.000.000,00
	04.	1.3.4.04.03.01.	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	2	3.000.000,00
5	05		ASET TETAP LAINNYA	1	28.800.000,00
	05.	1.3.5.	ASET TETAP LAINNYA	1	28.800.000,00
	05.	1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	1	28.800.000,00
	05.	1.3.5.02.02.	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	28.800.000,00

	05.	1.3.5.02.02.01.	PAHATAN		1	28.800.000,00	
--	-----	-----------------	---------	--	---	---------------	--

2.3. Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Keberhasilan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2018-2023 mengacu pada sasaran strategis *Meningkatnya PDRB Sektor Perikanan* dengan indikator kinerja *PDRB Sektor Perikanan* sedangkan pada Renstra Perubahan 2018-2023 mengacu sasaran strategis yaitu *Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan* dengan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi yaitu *Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan*.

Keberhasilan pembangunan perikanan yang dilaksanakan dapat dilihat dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung seperti pada tabel 5.

Sedangkan kinerja anggaran dan realisasi pendanaanya sebagai pendukung utama keberhasilan pembangunan disektor perikanan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 ^{*)}	2019	2020	2021	2022	2023 ^{*)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	PDRB Sektor Perikanan (Rp.)	-	-	-	237.942.462.422	249.232.245.953	638.187.849.673	655.833.853.768	673.973.570.654	266.267.310.000	203.061.969.673	1.697.298.440.020	2.242.961.679.300		111,90	81,47			
2.	Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan(Rp.)															265,96	342		

^{*)} Ket. Data tersedia sampai dengan akhir Desember 2022

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 ^{*)}	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	265,600,000	207,150,000	216,858,000	191,861,000	191,861,000	231,988,800	207,256,000	226,563,000	203,061,000		87.38	100.06	104.48	105.84		-9.62	-3.91
Pendapatan Asli Daerah	265,600,000.00	207,150,000	216,858,000	191,861,000	191,861,000	231,988,800.00	207,256,000	226,563,000	203,061,000		87.35	100.05	104.48	105.84			
BELANJA DAERAH	10,780,308,000	8,106,340,000	8,747,617,480	10,288,643,186	7,344,326,307	9,486,717,972	7,086,611,468.72	8,131,008,214.21	9,848,035,885.50		87.72	87.40	92.98	92.80		0.23	2.36
Belanja Pegawai	2,465,665,000	2,502,164,000	4,096,436,044	4,310,340,906	4,285,216,307	2,283,996,249	1,972,876,353	3,757,342,901	4,036,418,292		92.63	78.85	91.72	93.64			
Belanja Barang dan Jasa	7,187,162,000	4,620,126,000	4,400,476,406	2,872,242,280	3,059,110,000	6,361,790,754	4,408,115,843	4,001,274,033.21	2,655,592,313		88.52	95.41	90.93	92.46			
Belanja Modal	1,127,478,000	986,050,000	404,740,000	220,660,000	93,400,000	810,930,969	705,619,272.72	372,388,280	212,093,950		71.92	71.56	92.01	96.12			

^{*)} Ket. Data tersedia sampai dengan akhir Desember 2022

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Kebijakan pembangunan di sektor perikanan dalam kurun waktu 2019-2023 yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dan Renstra Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 telah menghasilkan capaian pembangunan perikanan yang cukup berarti berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

a. PDRB Sektor Perikanan

Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan pada tahun kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2020 pada indikator PDRB sektor perikanan dibawah 100% yaitu 96,69% tidak tercapainya kinerja disebabkan adanya bencana nasional pandemic covid-19 selama tahun 2020.

b. Nilai Produksi Sektor Perikanan

Jika dilihat dari tabel pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indicator kinerja utama untuk Nilai Produksi Sektor Perikanan dalam kurun waktu tahun 2021-2022 capaian kinerjanya di atas 100% hal ini disebabkan adanya program dan kegiatan prioritas yang mana selain focus pada pada bantuan sarana dan prasarana produksi baik budidaya, tangkap maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga dilaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha di sub sector perikanan sehingga terjadi peningkatan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya, peningkatan penanganan pasca produksi hasil produksi perikanan terutama pengolahan hasil perikanan, sehingga daya saing produk meningkat yang dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk perikanan.

2.3.2. Capaian Kinerja Keuangan 2019-2023

Performance dari kinerja keuangan tahun 2019-2023 ditunjukkan pada tabel 6, yang mana rata-rata pencapaian kinerja keuangan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,94%. Tidak terpenuhinya target penyerapan secara maksimal dikarenakan adanya efisiensi dalam

pengadaan barang/jasa yang lebih rendah dari pada pagu anggaran dan adanya harga perkiraan sendiri.

Sedangkan untuk pendapatan asli daerah di sektor perikanan pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 6.76% dikarenakan meningkatnya sarana prasarana sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang bersumber dari: Retribusi Penyewaan Tanah, Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan, Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa benih ikan dan Retribusi Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah masyarakat pembudidaya ikan baik yang sudah bergabung dalam POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) maupun belum, masyarakat nelayan baik yang sudah bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun yang belum serta pengolah dan pemasar hasil perikanan Kabupaten Tulungagung baik yang sudah bergabung dalam kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) maupun yang belum.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Tulungagung di antaranya :

- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas SDI Laut dan PUD;
- b. Over produksi perikanan budidaya akibat menurunnya daya serap pasar di kondisi-kondisi tertentu terutama pada musim panen ikan hasil tangkap laut;
- c. Meningkatnya harga input produksi (terutama pakan ikan) karena kebutuhan akan pakan mendominasi biaya produksi sampai dengan 70% dari total biaya produksi;
- d. Penurunan SDI di PUD juga disebabkan berkembangnya ikan invasif yang bersifat karnivora di PUD, khususnya di Waduk Wonorejo dan perairan di sekitarnya;
- e. Kondisi SDI yang di duga over exploited yang diindikasikan dengan semakin kecilnya ukuran ikan yang ditangkap, semakin lamanya waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas penangkapan ikan, dan semakin rendahnya hasil tangkap;
- f. Masih minimnya sanitasi dan higienitas pada pengolahan ikan tradisional yang sering menyebabkan kerusakan produk baik disebabkan oleh bakteri dan jamur;
- g. Lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok karena sebagian besar kelompok pelaku usaha perikanan belum berbadan hukum atau belum ber SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sehingga menjadi kendala dalam penerimaan bantuan dari Pemerintah.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pembangunan di sektor Perikanan di antaranya:

- a. Kabupaten Tulungagung memiliki PUD yang relatif luas \pm 504,5 ha hal ini merupakan peluang untuk mengelola perikanan tangkap secara berkelanjutan;
- b. Potensi lahan seluas 357,84 Ha dan sumber air yang tersedia sepanjang tahun untuk kegiatan budidaya merupakan peluang untuk bagi pembudidaya ikan maupun nelayan dalam rangka memperoleh pendapatan alternatif melalui budidaya ikan;

- c. Meningkatnya permintaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan dan penyediaan produk olahan ikan yang higienis dan aman;
- d. Dari keseluruhan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar di Kabupaten Tulungagung yang tergabung dalam kelompok masih relatif kecil dibandingkan dengan yang belum tergabung dalam kelompok, hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui pembentukan kelompok dan meningkatkan kapasitas kelompok tersebut sehingga dapat mencapai kelas utama.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya dapat lihat pada tabel 7. berikut :

Tabel 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Aspek Kajian	Uraian Indikator	Capaian/Kondisi Saat ini (Awal Perencanaan/ Tahun 2022)	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (diluar Kewenangan Perangkat Daerah)
1. Perikanan Budidaya	1. Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya (%)	7.30	Indikator Program	1. Terbatasnya benih untuk produksi budidaya karena hampir 70 persen kebutuhan benih masih mengambil dari luar daerah sehingga sering mengakibatkan kegagalan dalam adaptasi lingkungan yang mengakibatkan kerugian karena kematian diawal, juga lebih rentan dengan penyakit.	1. Masih tingginya biaya produksi terutama pakan ikan. 2. Menurunnya daya beli masyarakat.
2. Perikanan Tangkap	1. Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap (%)	0.20	Indikator Program	1. Relatif rendahnya produksi perikanan tangkap PUD akibat dari SDI yang sudah terindikasi <i>over exploited-depleted</i> , adanya <i>species invasive, illegal fishing</i> . limbah rumah tangga. 2. Penurunan produksi akibat kerusakan perairan pantai yang dapat mengakibatkan rendahnya produksi perikanan tangkap laut, dan belum optimalnya penyelenggaraan pelelangan ikan. 3. Terbatasnya sarana tangkap ramah lingkungan.	1. Faktor iklim dan cuaca fluaktif yang memiliki dampak terhadap hasil tangkapan, sehingga bulan musim ikan lebih pendek daripada sebaliknya.
3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)	72.69	Indikator Program	1. Terbatasnya ketersediaan produk yang aman pangan. 2. Terbatasnya sarpras produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang modern dan higienis	1. Menurunnya permintaan produk karena beralihnya ke olahan daging.

1. Dalam Peningkatan produksi perikanan budidaya dipengerahui permasalahan baik internal maupun eksternal sebagaimana penjelasan berikut:

a. Internal (wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung)

Faktor permasalahan Internal yang mempengaruhi dalam peningkatan produksi budidaya ikan diantaranya adalah:

1. Terbatasnya benih untuk produksi budidaya karena hampir 70 persen kebutuhan benih masih mengambil dari luar daerah sehingga sering mengakibatkan kegagalan dalam adaptasi lingkungan yang mengakibatkan kerugian karena kematian diawal, juga lebih rentan dengan penyakit.

b. Eksternal (diluar wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung)

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya biaya produksi terutama pakan ikan.
2. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan.

2. Dalam Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.

a. Internal (wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung)

Faktor Internal yang mempengaruhi dalam peningkatan produksi perikanan tangkap adalah diantaranya:

1. Relatif rendahnya produksi perikanan tangkap PUD akibat dari SDI yang sudah terindikasi *over exploited-depleted*, adanya *species invasive, illegal fishing*. limbah rumah tangga.
2. Penurunan produksi akibat kerusakan perairan pantai yang dapat mengakibatkan rendahnya produksi

perikanan tangkap laut, dan belum optimalnya penyelenggaraan pelelangan ikan.

3. Terbatasnya sarana tangkap ramah lingkungan.

b. Eksternal (diluar wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung)

Sedangkan faktor yang mempengaruhi secara eksternal diantaranya adalah:

1. Faktor iklim dan cuaca fluaktif yang memiliki dampak terhadap hasil tangkapan, sehingga bulan musim ikan lebih pendek daripada sebaliknya.

3. Dalam Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

a. Internal (wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung)

Faktor Internal yang mempengaruhi dalam peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah diantaranya:

1. Terbatasnya ketersediaan produk yang aman pangan
Terbatasnya ketersediaan produk yang aman pangan;
2. Terbatasnya sarpras produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang modern dan higienis.

b. Eksternal (diluar wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung)

Sedangkan faktor yang mempengaruhi secara eksternal diantaranya adalah:

1. Menurunnya permintaan produk karena beralihnya ke olahan daging.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat. Sesuai tugas pokok dan fungsinya dijelaskan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi

permasalahan di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra baik Renstra K/L ataupun renstra Provinsi/Kabupaten dapat dilihat pada tabel 8. berikut:

Tabel 8. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor pendorong dan penghambat keberhaslilan penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Tulungagung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya daya saing produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perikanan baik tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan. Belum adanya kesadaran sebagian besar pelaku usaha perikanan dalam penerapan CPIB dan CBIB 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat diantaranya paket bantuan calon induk unggul, pakan induk, sarpras pembenihan ikan, sarpras penangkapan ikan dan sarpras pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta Fasilitasi sertifikasi CPIB, CBIB dan SSOP.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sub sektor perikanan bisa

berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan limbah dari hasil budidaya perikanan berhubungan dengan penurunan kualitas air. Adapun permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dikaitkan dengan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung serta KLHS dapat dilihat pada tabel 9. berikut:

Tabel 9. Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong yang dikaitkan dengan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

No.	Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Sentra produk unggulan menjadi kawasan	Belum ditetapkannya sentra produk unggulan sebagai kawasan	Belum adanya roadmap pengembangan kawasan	Di dukung dengan SDA, baik lahan. Air dan sarana prasarana jalan dalam rangka kemudahan distribusi hasil produksi

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan perekonomian sub sektor perikanan di Kabupaten Tulungagung tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang dipengaruhi baik faktor eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2026. Pembangunan perikanan tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi sumber daya, melainkan harus diperhatikan keberlangsungannya (*sustainability*). Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan di sub sektor perikanan di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produksi perikanan akibat dari belum optimalnya produksi perikanan tangkap sehingga diperlukan peningkatan ketersediaan sarpras alat tangkap ramah lingkungan, penangkapan ikan invasif, penebaran benih ikan di PUD (Perairan Umum Daratan);

2. Masih tingginya biaya produksi untuk budidaya perikanan terutama biaya produksi pakan sehingga diperlukan pembinaan dan penyediaan sarpras pembuatan pakan ikan apung;
3. Belum seimbangnya antara produksi dan jumlah permintaan sehingga diperlukan promosi dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing produk sehingga ketersediaan produk olahan hasil perikanan yang memenuhi standar aman pangan meningkat.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan akan mengarahkan perumusan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel 10. berikut:

Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas layanan Kesekretariatan PD		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan PD	98.04	100	100
2.		Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP PD	83.9	83.9	83.9
			Indeks Profesionalisme ASN PD	61.09	61.09	61.09
			Prosentase Kualitas Layanan Kesekretariatan PD (%)	82	82	82
3.	Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan		Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan (%)	5	5	5
4.		Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Rata-rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan (%)	5	5	5

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung diperlukan metode penentuan strategi dan arah kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Yang mana melalui Analisis SWOT dikembangkan dengan menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi (core competence) dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang sehingga dapat merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai solusi permasalahan berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang saat ini, yang mana rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 11. di bawah ini:

Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal, berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat perikanan	1.	Pembinaan dan bantuan sarana produksi usaha perikanan tangkap
			2.	Sosialisasi dan restocking PUD
			3.	Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan kelompok usaha perikanan tangkap
			4.	Pembinaan dan bantuan sarpras produksi usaha perikanan budidaya
			5.	Pembinaan dan Fasilitasi dalam pengendalian hama dan penyakit ikan
			6.	Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan kelompok usaha perikanan budidaya
			7.	Pembinaan dan bantuan sarpras produksi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			8.	Pembinaan dan pemantauan ketersediaan bahan baku untuk industri olahan ikan
			9.	Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan UMKM

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan 2024 - 2026

Rencana program merupakan penjabaran dari langkah-langkah pokok yang akan diambil untuk menindak lanjuti arah kebijakan. Sejalan dengan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang dirumuskan, ditetapkan 3 program wajib dan 3 program pilihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026 seperti pada terlihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Renstra PD														Kondisi pada Akhir Periode Renstra
Tujuan Renstra	IK Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	IK Sasaran Renstra	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Awal Kinerja (2022)	2024		2025		2026		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas layanan Kesekretariatan PD	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan PD						94.23	98.04		100		100		100
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan PD			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	94.23	100	4378904511.88	100	4411746295.7191	100	4444834392.93699	100
			Nilai Evaluasi SAKIP PD				83.9	83.9		83.9		83.9		83.9
			Indeks Profesionalisme ASN PD				61.09			61.09		61.09		61.09
			Prosentase Kualitas Layanan Kesekretariatan PD (%)				80	82		82		82		82
Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan (%)						32.1485	5.00		5.00		5.00		5.00
		Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Rata-rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan (%)				26.73	5.00		5.00		5.00		5.00

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja (dokumen)	9	9	6976400	9	7028723	9	7081438.42	36
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	428000	2	431210	2	434444.075	8
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	5478400	2	5519488	2	5560884.16	8
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	1070000	5	1078025	5	1086110.1875	20
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan (dokumen)	14	14	2935590392.88	14	2957607320.8266	14	2979789375.7328	56
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	2790455592.88	31	2811384009.8266	31	2832469389.90	31
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	141240000	1	142299300	1	143366544.75	4
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	1926000	12	1940445	12	1954998.3375	48

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2	2	1968800	2	1983566	2	1998442.745	8
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian daerah(dokumen)	1	1	107062060	1	107865025.45	1	108674013.14	4
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71	80	49282060	80	58213350	80	58649950.125	80
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	14	49282060	14	49651675.45	14	50024063.012	14
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP (%)	100	100	343281359	100	345855969.1925	100	348449888.96	100
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	11087019	7	11170171.64	7	11253947.92	7
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	6	153808220	6	154961781.65	6	156123995.01	6
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	6	10700000	6	10780250	6	10861101.875	6

				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	13877900	12	13981984.25	12	14086849.13	48
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	153808220	12	154961781.65	12	156123995.01	48
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia (%)	75	100	746603200	100	752202724	100	757844244.43	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	307344660	12	309649744.95	12	311972118.04	48
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	57929800	12	58364273.5	12	58802005.55	48
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	381328740	12	384188705.55	12	387070120.84	48
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara (%)	75	100	239391100	100	241186533.25	100	242995432.25	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	48	173714500	48	175017358.75	48	176329988.94	48

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	3	65676600	3	66169174.5	3	66665443.31	13
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap (%)	0.2	5.00	149800000	5.00	150923500	5.00	152055426.25	5.00
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Tangkap PUD (ton)	20.20	21.43	89800000	22.07	90473500	22.74	91152051.25	22.74
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	145	10	39800000	10	40098500	10	40399238.75	214
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	0	7	50000000	7	50375000	7	50752812.5	21
					Jumlah Benih Ikan di Tebar Di PUD (ekor)	275000	107,000.00		114,490.00		122,504.30		122,504.30
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap laut (Ton)	10,188.20	11,232.49	30000000	11,794.12	30225000	12,383.82	30451687.5	12,383.82
					Jumlah Peningkatan kelompok Nelayan Kecil (KUB)	3	2	-	2	-	2	-	2

				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	150	50	30000000	50	30225000	50	30451687.5	50
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Ikan yang dilelang (Ton)	477.65	577.96	30000000	635.75	30225000	699.33	30451687.5	699.33
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	30000000	1	30225000	1	30451687.5	1
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya	7.30	5.00	1326625278.39	5.00	1336574967.98	5	1346599280.24	5
				Pemberdayaan Pembudi Daya ikan Kecil	Jumlah Peningkatan kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	20	10	75000000	10	75562500	10	76129218.75	10
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	67	50	75000000	50	75562500	50	76129218.75	50
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi (ton)	42,026.00	46,333.67	48,650.35	1261012467.98	51,082.87	1270470061.49		1270470061.49
					Jumlah Produksi Ikan Hias (ekor)	62,403,700.	68,800,079	72,240,083		75,852,087			
					Jumlah Produksi Benih Ikan (ekor)	94,880,767	104,606,046		109,836,348		115,328,165		115,328,165

				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	10000000	2	100750000	2	101505625	2
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55	35	1101625278.39	35	1109887467.98	35	1118211623.99	35
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	1	50000000	1	50375000	1	50752812.5	1
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	72.69	5.00	296627011.85	5.00	298851714.44	5.00	301093102.30	5.00
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)	28,347.50	31,253.12	61627011.85	32,815.77	62089214.44	34,456.56	62554883.55	34,456.56
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan	21	5	61627011.85	5	62089214.44	5	62554883.55	5

					Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit)									
					Jumlah Peningkatan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan (poklaha)	0	1		1		1		1	
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Ikan (%)	1.5	1.5	235000000	1.5	236762500	1.537	238538218.75	1.537
					Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.04	18.16	100000000	18.43	100750000	18.706	101505625	18.706
					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	110	50	135000000	50	136012500	50	137032593.75	50

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan kinerja penyelenggaraan bidang urusan dapat dilihat capaian kinerja Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD lima tahun mendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan (%)	26.73	5	5	5	5
2	Persentase Capaian Produksi Perikanan (%)	130.76	135.76	140.76	145.76	145.76
3	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	245	2	2	2	251
4	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional (%)	50	50	50	50	50
5	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) (pembudidaya ikan)	410	50	50	50	560

6	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi (ekor)	94,880,767	104,606,046	109,836,348	115,328,165	115,328,165
---	--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam masa transisi yang berisi Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan untuk menjalankan kinerja berdasarkan tupoksi melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2014-2026 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPD Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Semoga dengan disusunnya Perubahan rencana strategis Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan di sub sektor perikanan Kabupaten Tulungagung.